

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN
KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2010-2016

JURNAL



Oleh:

Nama : Iklal Hadi Anfana
Nomor Mahasiswa : 14313291
Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA

2018

ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010-2016

JURNAL

Iklal Hadi Anfana, Unggul Priyadi

Anfanaiklal12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis pertumbuhan ekonomi menggunakan analisis shift share dan analisis tipologi klasen untuk melihat perubahan setruktur ekonomi di provinsi nusa tengara barat. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode shift share dan tipologi klassen, diperoleh hasil bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki dekomposisi pertumbuhan yang lebih besar dari sektor primer karena memiliki koefisien yang lebih besar, untuk metode tipologo klassen diperoleh tiga daerah cepat maju dan cepat tumbuh (Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram), satu daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Dompu), satu daerah cepat berkembang (Kabupaten Lombok Tengah), dan lima daerah relatif tertinggal (Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima, Kota Mataram).

Analisis ketimpangan pembangunan menggunakan analisis indeks williamson dan indeks gini. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perhitungan rumus matematika indeks williamson dan indeks gini diperoleh hasil bahwa selama priode penelitian ketimpangan pembangunan di perovinsi nusa tenggara barat cenderung menurun, hal ini ditunjukkan oleh nilai indeks williamson dan indeks gini yang semakin mendekati nol.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pembangunan, Strukur Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Wiliamson

Abstract

The purpose of this study is to know the growth of economy and disparity of development in Provinces of Western Southeast. The analysis growth of economic using Shift Share analysis and Klassen Typology, to see the change of economic structure in the province of western southeast. based on the result of this study with Shift Share method and Klassen Typology, it's found that secondary and tertiary sectors have greater of growth decomposition from primary sector, because it has bigger coefficient, for Klassen Typology method obtained three fast forward and fast growing regions (regency of Sumbawa , regency West Sumbawa, Mataram city) one developed but degraded district (regency of Dompu) one fast growing region (Central Lombok) and five relatively left behind the areas (Western Lombok, East Lombok, North Lombok, Bima, Mataram City).

The analysis of disparity of development used Williamson Index analysis and Gini Index. based on the result of analysis used the calculation of math formula Williamom Index and Gini Index obtained the result that during the study period of the disparity of development in the province of western southeast tended to decline, this is indicated by Williamson Index value and Gini Index approaches to zero

Keywords: *Growth Of Economy, Disparity of Development, Structur Economy, Gini Index, Williamson Index*

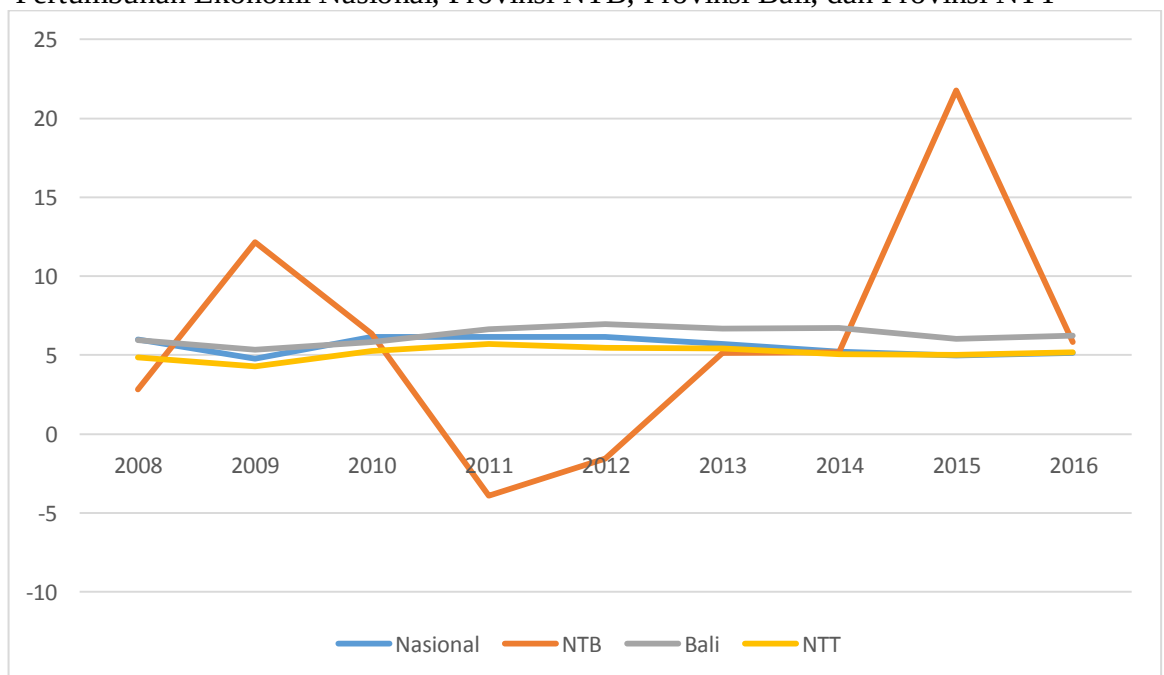
A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan, Todaro, (2007). Maka sejatinya tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, berkelanjutan dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak diimbangi dengan pemerataan, akan menimbulkan ketimpangan Wilayah. Ketimpangan Wilayah (regional disparity) tersebut, terlihat dengan adanya Wilayah yang maju dengan Wilayah yang terbelakang atau kurang maju.

Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang umum dan familiar bagi masyarakat karena dengan mudah diukur secara kuantitatif. Pertumbuhan ekonomi berarti adanya kenaikan pendapatan total maupun individu sebagai akibat meningkatnya Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi berubah atau tidak. Pertumbuhan harus berjalan secara berdampingan dan berencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan kerja dan pembagian hasil-hasil pembangunana yang lebih merata. Jika hal ini berlangsung secara berkelanjutan maka Daerah-Daerah akan terpacu untuk terus tumbuh dan berkembang. Daerah yang semula tidak produktif dan tertinggal akan

memiliki peluang untuk maju dan memiliki produktivitas yang sama atau bahkan lebih baik dari Daerah lainnya.

Grafik 1.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTB, Provinsi Bali, dan Provinsi NTT



Sumber : BPS NTB, 2016

PDRB atas harga konstan Provinsi NTB, selama tahun 2008-2016 tumbuh dengan rata-rata 5,97 persen pertahun, jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan Provinsi Bali dan Provinsi NTT, tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi NTB berada diantara kedua Provinsi tersebut, Provinsi Bali memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tertinggi yaitu 6,27 persen, pertumbuhan rata-rata Provinsi NTT menjadi yang terendah yaitu 5,13 persen.

Selama priode tahun 2008-2016 Provinsi NTB terus mengalami perkembangan yang positif, hal ini digambarkan dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB dua tahun terakhir mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2015 Provinsi NTB menjadi Provinsi dengan

tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan 21,77 persen, pada periode yang sama pertumbuhan ekonomi Nasional 4,99 persen. Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 dengan tingkat pertumbuhan 5,82 persen, berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang tumbuh 5,16 persen.

Berdasarkan sisi produksi atau supply side, kontribusi pembentuk pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB porsi terbesar disumbangkan oleh sektor pertanian dengan kontribusi rata-rata pertahun selama 2011-2016 sebesar 23,05 persen. Meskipun memiliki peranan terbesar, sektor pertanian rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 4,37 persen, lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan pertambangan dan penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 10,48 persen, diikuti oleh laju pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 11,01 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah sektor listrik dan gas dengan porsi hanya 0,05 persen terhadap PDRB dan laju pertumbuhan sebesar 14,14 persen.

Berdasarkan sisi pengeluaran demand side, selama tahun 2011-2016 kontribusi sektor pengeluaran rumah tangga rata-rata sebesar 70.56 persen pertahun, terbesar dari semua sektor, dengan rata-rata laju pertumbuhan 8.93 persen pertahun. Sektor pengeluaran konsumsi pemerintah menempati urutan ketiga sebesar 16,35 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 12, 46 persen. Sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah sektor pembentukan modal

total bruto dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 14,12 persen dengan kontribusi terhadap total pembentukan PDRB sebesar 36,56 persen.

Pada kenyataannya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus menerus meningkat tidak secara otomatis akan menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan pembangunan yang paling jelas dan umum kita lihat adalah ketimpangan pada tingkat pendapatan yang pada akhirnya akan mengakibatkan adanya golongan kaya dan miskin, aspek spasial yang menyebabkan adanya Daerah maju dan Daerah terbelakang serta aspek spasial yang menyebabkan adanya sektor unggulan dan non unggulan. Ketimpangan pembangunan menjadi persoalan yang kompleks sehingga sulit untuk di atasi.

Provinsi NTB terjadi perbedaan pembangunan pada setiap kabupaten dan kota. Kota mataram selaku ibu kota Provinsi dan menjadi jantung penggerak kegiatan perekonomian. Dinamika perekonomiannya sangat terasa dibidang jasa, perdagangan dan pendidikan. Hal ini tidaklah mengherankan jika masyarakat memiliki pendapatan prkapita yang lebih tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah, kualitas SDM yang baik menyebabkan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi serta akses terhadap infrastruktur yang lebih mudah dijangkau. Berbeda dengan yang dirasakan oleh Wilayah-Wilayah kabupaten lainnya. Kabupaten Sumbawa misalnya sebagai kabupaten terluas dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan fisik Wilayah yang lebih luas, penduduk dan ketersediaan infrastruktur lebih menyebar dan tidak merata. Hal ini menggambarkan bahwa masih tingginya tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi NTB.

Keimpangan jumlah penduduk, besarnya PDRB dan PDRB per kapita juga menjadi gambaran ketimpangan pembangunan yang terjadi di Provinsi NTB. Kesenjangan ekonomi antar kota dan kabupaten di Nusa Tenggara Barat cukup tinggi, digambarkan dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan melihat PDRB per kapita tertinggi dan terendah dalam kurun waktu 2008-2013. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan PDRB per kapita terendah dengan rata-rata 11,36 juta rupiah pertahun. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di kabupaten Lombok Timur yang sebagian besar adalah masyarakat miskin. Jumlah penduduk miskin kedua terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 19,00 persen pada tahun 2014, lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi dan nasional. Kabupaten Lombok Utara sebagai kabupaten termuda yang mekar pada tahun 2008 dari Wilayah induknya kabupaten lombok Barat, memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi 35,52 persen pada tahun 2014, dengan rata-rata pendapatan per kapita 13,94 juta pertahun berada di atas kabupaten Lombok Timur.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten dengan tingkat pendapatan per kapita tertinggi dengan rata-rata 118,31 juta pertahun, dibandingkan dengan kabupaten lainnya, besarnya pendapatan per kapita kabupaten Sumbawa Barat disumbangkan oleh sektor pertambangan dari konsentrat tembaga. Kontribusi sektor pertambangan komposisinya mencapai lebih dari 80 persen terhadap total PDRB Sumbawa Barat. Kontribusi ini sebagian dinikmati perekonomian Sumbawa Barat secara langsung tapi sebagian besar berupa royalti yang tidak bisa langsung dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

PDRB Kabupaten Sumbawa Barat tinggi karena didukung oleh ekspor tembaga, dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar sehingga nilai pendapatan per kapita menjadi tinggi. Jika penggalan dan pertambangan berhenti beroperasi maka PDRB Kabupaten Sumbawa Barat akan mengalami penurunan.

Tabel 1.
Perbandingan Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2010-2016

Uraian	Kondisi Awal Provinsi (2010)	Kondisi Trakhir (2016)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,11	5,82
Penduduk (juta jiwa)	4.500	4.896
Pengangguran (%)	5,29	3,94
Kemiskinan (%)	21,55	16,02
Inflasi (% pertahun)	9,06	3,02
PDRB Riil (milyar rupiah)	70 122.72	116 246.73
PDRB prkapita Riil (juta rupiah)	15.53	23.74
Pengeluaran prkapita Riil (rupiah)*	6.335	9.575
Nilai Ekspor (US\$)	137.020,4	150.366,8
Angka Harapan Hidup (tahun)	61,50	65,48
Angka Melek Hurup (%)	80,13	87,06
Rata-rata Lama Sekolah	6,70	6,79
IPM dan rangking nasional	64,1 (32)	65,81 (32)

Sumber : BPS NTB, 2016

Secara umum indikator perekonomian Nusa Tenggara Barat kurun waktu tahun 2010-2016 positif dan terus tumbuh, laju pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh di atas rata-rata Nasional, angka pengangguran mengalami penurunan yang signifikan bahkan setengah dari persentase pada tahun 2010 diikuti dengan angka kemiskinan yang menurun signifikan sampai menyentuh angka 16,02 persen. Pendapatan masyarakat secara total maupun per kapita juga meningkat. Ditungjang dengan laju inflasi yang menurun menyebabkan daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Komponen pembentuk indeks pembangunan manusia juga

meningkat walaupun IMP Nusa Tenggara Barat secara nasional tetap berada diperingkat 32.

B. KAJIAN KEPUSAKAAN

1. Struktur ekonomi

Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Todaro (2000).

Menurut Djodjohadikusumo (1994), pembangunan ekonomi merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktur perekonomian, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian antara perubahan struktur dan pertumbuhan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Menurut Tarigan (2007), untuk melihat struktur ekonomi secara lebih tajam digunakan analisis Shift-share. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu Daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor disuatu Daerah dalam kaitannya dengan ekonomi nasional.

Struktur ekonomi suatu Wilayah juga dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis tipologi Daerah. Menurut Hill dalam Mudrajat Kuncoro (2004), analisis tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing Daerah. Tipologi Daerah pada dasarnya membagi Daerah menjadi 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi Daerah dan pendapatan prkapita (PDRB per kapita). Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan prkapita (PDRB per kapita) sebagai sumbu horizontal, Daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu:

1. High growth and high income (Daerah cepat maju dan cepat tumbuh)
2. High growth but low income (Daerah berkembang cepat)
3. Low growth and low income (Daerah relatif tertinggal)
4. High income but low growth (Daerah maju tapi tertekan)

2. Indikator Pembangunan

Menurut Rustiadi (2009), persoalan pembangunan di negara sedang berkembang tidak hanya menyangkut perlunya investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan aspek distribusi dan pemerataan hasil pembangunan. Dengan demikian hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan proporsional. Para pakar pembangunan ditahun 1970-an mulai mengkaji ulang indikator tingkat pencapaian pembangunan dari tujuan yang telah ditetapkan dari suatu Wilayah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Pembangunan

Basis atau pendekatan	Kelompok	Indikator-indikator
Tujuan Pembangunan	Pertumbuhan, produktivitas dan efisiensi	Pendapatan Wilayah, PDRB, PDRB prkapita, pertumbuhan PDRB. Kelayakan finansial dan ekonomi. Spesialisasi, keunggulan komparatif dan kompetitif: LQ dan Shift-Share.
	Pemerataan, keberimbangan, keadilan (equity).	Distribusi pendapatan; Gini Ratio. Ketenagakerjaan; pengangguran terbuka, terselubung, setengah pengangguran. Kemiskinan; Good service ratio, konsumsi makanan, garis kemiskinan. Regional balance; spatial balance, sentral balance, capital balance, sectoral balance.
	Keberlanjutan (Sustainability)	Dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial.
Sumber daya	Sumberdaaya manusia. Sumber daya alam. Sumber daya buatan atau sarana prasarana. Sumber daya sosial.	Pengetahuan, skill, etos kerja, kompetensi, pendapatan, kesehatan dan IPM. Degradasi Skalogram, aksesibilitas terhadap fasilitas. Organisasi sosial, aturan adat atau budaya.
Proses pembangunan	Inpit, implementasi, output, outcame, benefit, ipact	Input dasar (SDM, SDA, infrastruktur, SDS), input antara

Sumber : Rustiadi (2009)

3. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Para ekonom pada umumnya memberikan pengertian yang sama mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai kenaikan GDP/GNP saja tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak, Arsyad

(1999). Menurut Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, penekanan pada proses karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat inmaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas, Arsyad(1999).

C. PENELITIAN SEBELUMNYA

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Judul, Penulis & tahun	Hasil
Anaaisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2000-2010, (Anton Tri Wijayanto, 2016)	Metode analisis: Indeks Gini Indeks Pro-Poor Growth Hasil penelitian: Pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara juga meningkatkan ketimpangan pendapatan.
Analisis kesenjangan pembangunan ekonomi antara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah di era otonomi Daerah tahun 2002-2011, (Panji Irawan Yogyadipratama ¹ , P.eko Prasetyo ² , Fafurida ³ , 2016)	Metode analisis: Indeks Williamson Hasil penelitian: Ketimpangan pembangunan ekonomi antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang dihitung dengan menggunakan Indeks Williamson selama periode 2008-2011 menunjukkan ketimpangan semakin melebar.
Pertumbuhan ekonomi dan	Metode analisis: Indeks Williamson

ketimpangan antara Kabupaten di Kalimantan Timur, (Tutik Yuliani, 2015)	<p>Indeks Entropy Theil</p> <p>Hipotesis Kuznets</p> <p>Hasil penelitian: Peningkatan ketimpangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di sebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, konsentrasi kegiatan ekonomi, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Indeks Entropi Theil semakin kecil dengan kata lain distribusi pendapatan semakin merata dari tahun ketahun. dari hasil analisis Hipotesis Kuznets antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Williamson berhubungan negatif, hal ini menunjukkan jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka ketimpangan pembangunan semakin tinggi.</p>
Analisis ketimpangan dan pembanguana ekonomi Provinsi Gorontalo, tahun 2001-2008, (Herwin Mopangga, 2011)	<p>Metode analisis: Shift share</p> <p>Matrik tipologi klassen</p> <p>Indeks Williamson</p> <p>Indeks Gini ratio</p> <p>Hasil penelitian: Berdasarkan Indeks Wiliamson kondisi ketimpangan di Provinsi Gorontalo di awal pembangunan cenderung meningkat dan berangsur menurun. Secara simultan perbedaan pada PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rasio Belanja Infrastruktur (RBI) sangat signifikan sebagai sumber utama ketimpangan di Provinsi Gorontalo.</p>

D. METODE PENEITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif menggunakan analisis *shift share* dan matriks tipologi klassen untuk menjelaskan setruktur ekonomi wilayah, untuk melihat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Gini.

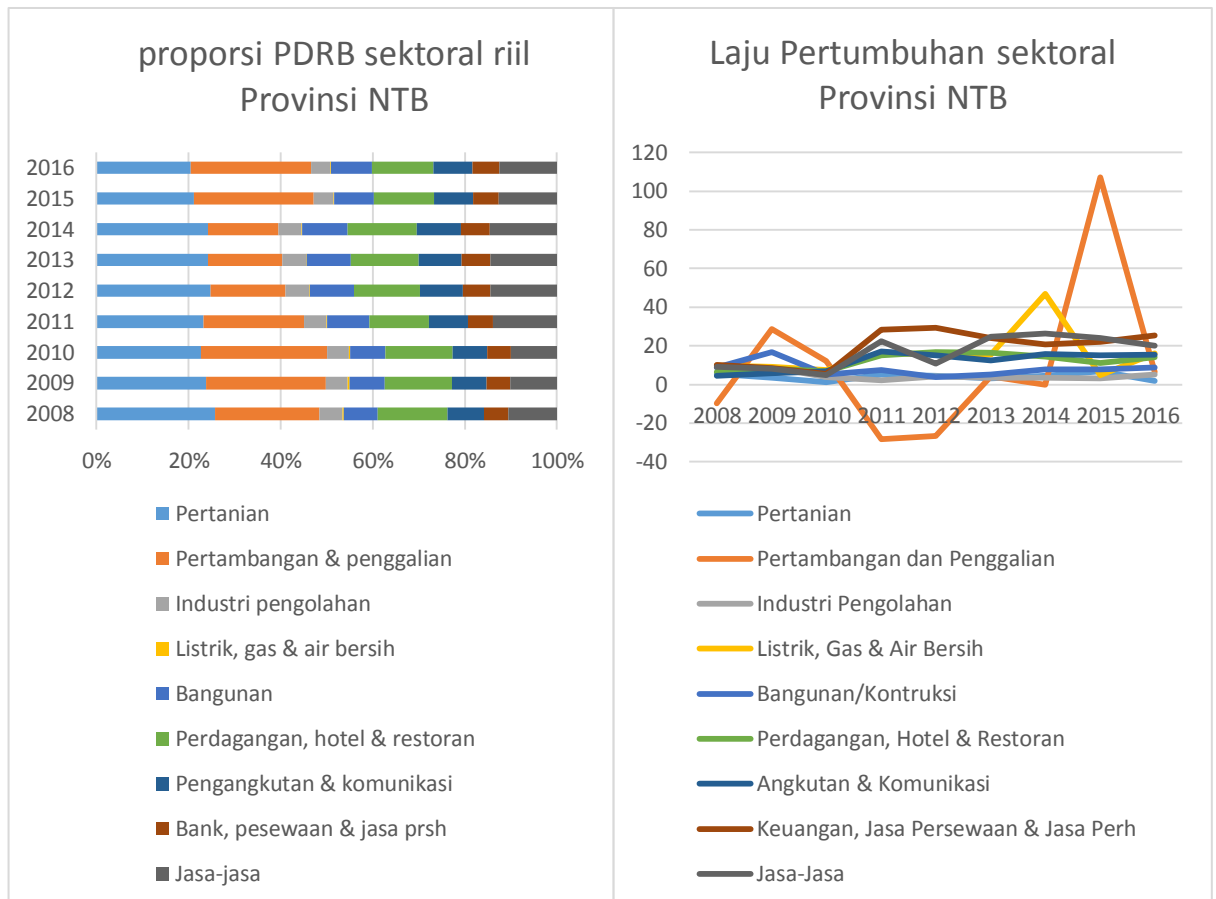
E. HASIL PENELITIAN

1. Struktur Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bebagai aktivitas perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah berperan dalam pembentukan PDRB Provinsi NTB. Kondisi geografis dan alam Provinsi NTB menjadikan aktivitas dibidang pertanian, pertambangan dan penggalan menghasilkan nilai tambah yang cukup tinggi di antara bidang-bidang lainnya. Sehingga dalam struktur ekonomi NTB bidang-bidang tersebut mendominasi pembentukan PDRB, peranan sektor pertanian menjadi yang tertinggi dengan rata-rata kontribusi 23,35% pertahun diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalan, dan perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata 21,98% dan 14,21% pertahun.

Meskipun pertanian merupakan penyumbang terbesar, namun memiliki laju pertumbuhan ekonomi sektoral relatif rendah, hanya rata-rata 4,06% per tahun. Pertumbuhan ini relatif kecil dibandingkan dengan laju sektor listrik yang memiliki kontribusi tidak cukup 1% namun memiliki laju pertumbuhan rata-rata 15,68% per tahun. Laju pertumbuhan sektor pertanian terbesar adalah pada tahun 2015 (6,91%) dan terendah pada tahun 2010 (1,33 %). Sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar adalah jasa keuangan (19,33%), jasa-jasa (16,72%), dan listrik (15,68%).

Grafik 1
PDRB sektoral dan laju pertumbuhan



Sumber: Hasil Perhitungan

Terdapat kesenjangan dalam struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jika antara kontribusi dan pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi sektoral) ini dikaitkan dengan kontribusi dan pertumbuhan tenaga kerja sektoral. Misalnya untuk sektor pertanian dari tahun 2009-2014 memiliki kontribusi PDRB sektoral di atas 20%, relatif terbesar dengan sektor lainnya. Demikian halnya dengan kontribusi tenaga kerja sektoralnya yang mencapai separuh dari total penggunaan tenaga kerja yang ada di Nusa Tenggara Barat. Namun kontribusi PDRB sektor pertanian yang relatif besar ini hanya diikuti dengan laju

pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan PDRB) yang relatif rendah dibandingkan sektor lainnya, dari 3,54 pada tahun 2009 menjadi 4,46 pada tahun 2014. Bandingan dengan sektor keuangan yang hanya memiliki kontribusi PDRB 5,15% di tahun 2009 menjadi 6,18% di tahun 2014 tetapi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sektor pertanian, yaitu dari 8,60% di tahun 2009 menjadi 20,72% di tahun 2014.

Ketimpangan ini didukung juga dengan perbedaan kontribusi dan laju pertumbuhan tenaga kerja sektoral. Sektor pertanian bukan hanya memiliki kontribusi PDRB yang terbesar, tetapi juga tenaga kerja sektoral terbesar 44,94% di tahun 2009 menjadi 43,13% di tahun 2014, dengan kontribusi PDRB terbesar yang diikuti dengan laju pertumbuhan ekonomi relatif rendah, kontribusi tenaga kerja sektor pertanian juga diikuti oleh penurunan tenaga kerja, hal ini salah satu penyebab laju pertumbuhan ekonomi sektoral semakin rendah, dikarenakan ada proporsi tenaga kerja yang semakin berkurang, terjadi perubahan proporsi tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil perhitungan *shift-share analysis* (SSA) didapatkan sektor yang potensial dan pertumbuhan ekonomi yang terbesar di masing-masing kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat rata-rata terjadi pada sektor non pertanian (sektor tersier dan sekunder). Artinya telah terjadi transformasi struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2010-2016. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil SSA dari interval 2010-2016. Pada masing-masing wilayah diambil 3 sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar pada *koponen proportionaliy shift* dan *differential shift*. Di peroleh hasil bahwa sektor sekunder

dan tersier memiliki dekomposisi pertumbuhan yang lebih baik dari sektor primer karena memiliki koefisien terbesar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Kuznet bahwa perubahan struktur (transformasi struktural) merupakan rangkaian perubahan yang saling terkait. Perubahan yang terjadi pada sektor sekunder dan tersier disebabkan perubahan yang terjadi pada sektor primer, demikian sebaliknya. Kegiatan perekonomian perlahan beralih ke sektor sekunder dan tersier sehingga menyebabkan sektor primer semakin konstan.

2. Hasil Analisis *shift share*

Rata-rata hasil SSA selama periode tahun 2010-2016 menunjukkan:

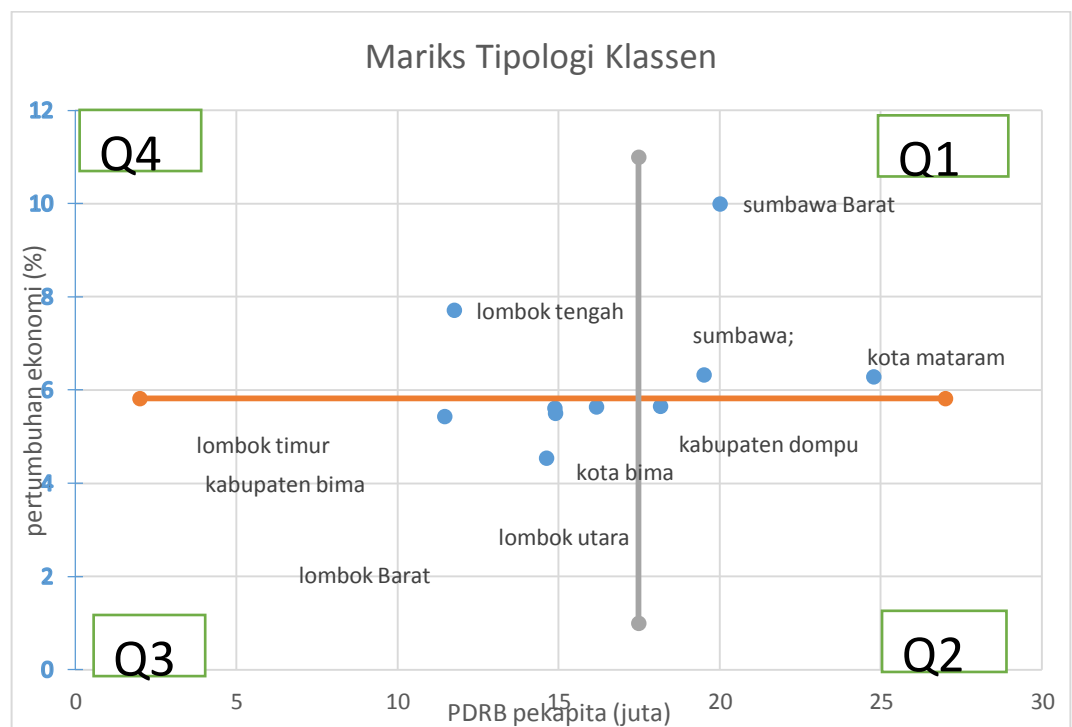
1. Kabupaten Bima: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,3321) lebih besar dibanding *differential shift* (-0,0367), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.
2. Kabupaten Dompu: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,5398) lebih besar dibanding *differential shift* (0,1710), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.
3. Kabupaten Lombok Barat: memiliki nilai SSA listrik, gas dan air bersih (0,3404) lebih besar dibanding *differential shift* (-0,0284), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.
4. Kabupaten Lombok Tengah: memiliki nilai SSA sektor pengangkutan dan komunikasi (4,4193) lebih besar dibanding *differential shift* (4,2086),

proportionality shift (0,1568). Hal ini menggambarkan sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.

5. Kabupaten Lombok Timur: memiliki nilai SSA sektor keuangan, persewaan (0,3142) lebih besar dibanding *differential shift* (-0,0473), *proportionality shift* (0,3074). Hal ini menggambarkan sektor keuangan, persewaan merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.
6. Kabupaten Lombok Utara: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,4099) lebih besar dibanding *differential shift* (0,0411), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.
7. Kabupaten Sumbawa: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,6145) lebih besar dibanding *differential shift* (0,2457), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.
8. Kabupaten Sumbawa Barat: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,8186) lebih besar dibanding *differential shift* (0,4498), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.
9. Kota Bima: memiliki nilai SSA sektor listrik, gas dan air bersih (0,867) lebih besar dibanding *differential shift* (0,0564), *proportionality shift* (0,3147). Hal ini menggambarkan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.

10. Kota Mataram: memiliki nilai SSA sektor keuangan, persewaan (0,6901) lebih besar dibanding *differential shift* (0,3286), *proportionality shift* (0,3074). Hal ini menggambarkan sektor keuangan, persewaan merupakan sektor yang paling kompetitif di daerah ini.

3. Hasil Analisis Tipologi Klassen



Sumber: Hasil Perhitungan

Gambar 1

Tipologi kelasn privinsi NTB tahun 2010-2016

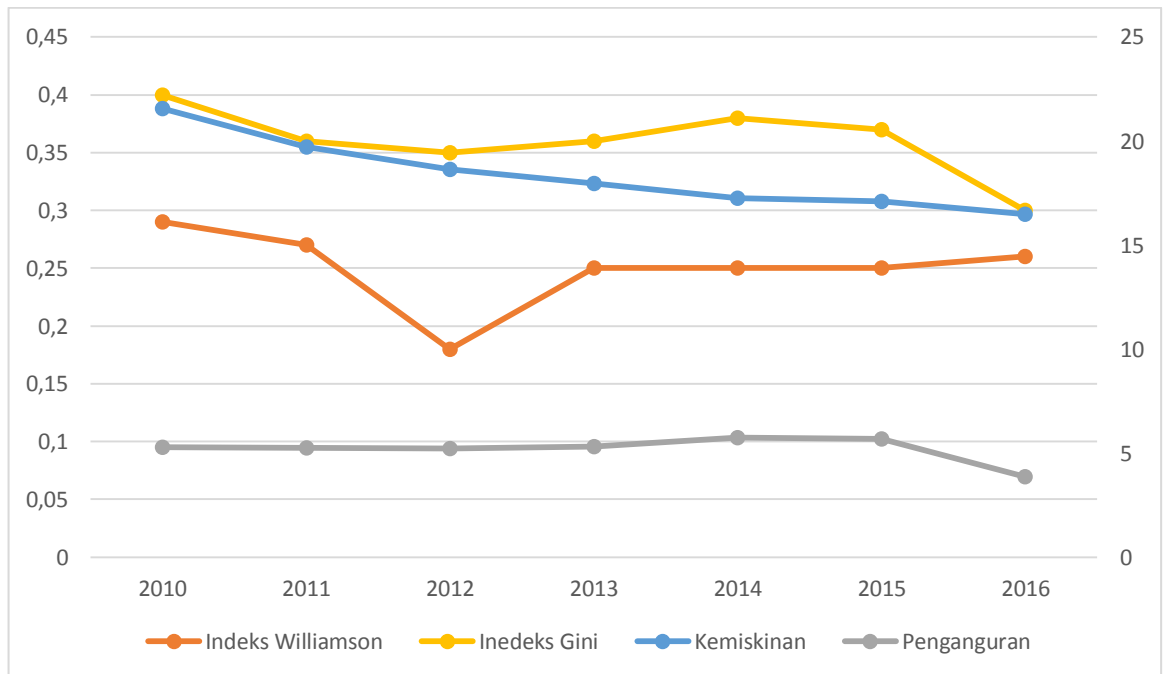
Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami ketimpangan. Terdapat tiga daerah (Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa) sebagai daerah cepat maju dan cepat tumbuh, serta satu daerah sebaga daerah berkembang cepat (Kabupaten Lombok Tengah), dan enam daerah sebagai daerah relatif tertinggal (Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok

Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Bima) dan daerah maju tapi tertekan ditempati oleh daerah Kabupaten Dompu.

4. Kondisi ketimpangan pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provisni Nusa Tenggara Barat

Analisis ketimpangan pembangunan menggunakan nilai PDRB per kapita dan total pengeluaran/pendapatan masyarakat dapat diketahui kondisi ketimpangan dalam suatu wilayah. Dengan nilai PDRB per kapita dapat digunakan untuk mendeskripsikan ketimpangan wilayah melalui alat analisis Indeks Williamson. Besarnya pengeluaran/pendapatan masyarakat digunakan dalam menjelaskan ketimpangan melalui Indeks Gini (Gini Ratio)

Grafik 2
Indeks Williamson, Indeks Gini, Kemiskinan dan Pengangguran



Sumber : BPS, Hasil Perhitungan, 2016

Grafik 2 menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara indeks ketimpangan dengan persentase tingkat kemiskinan dan persentase jumlah

pengangguran, hal ini terlihat ketika indeks ketimpangan menurun diikuti juga dengan penurunan persentase kemiskinan begitu juga dengan persentase pengangguran.

Indeks williamson dengan persentase tingkat kemiskinan dan persentase jumlah pengangguran dari tahun 2010-2013 penurunan maupun kenaikan indeks williamson (ketimpangan), searah dengan penurunan maupun kenaikan pengangguran setelah itu pada tahun 2014-2016, walaupun tingkat pengangguran mengalami penurunan namun tingkat ketimpangan pembangunan antar Wilayah meningkat. Demikian halnya dengan kemiskinan meskipun mengalami penurunan sejak 2010 tetapi ketimpangan yang diwakili oleh indeks williamson tetap mengalami peningkatan. Artinya hasil pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Hubungan indeks gini dengan kondisi kemiskinan (persentase penduduk miskin) dan pengangguran (persentase pengangguran), naik turunnya indeks ketimpangan seiring pola perubahan persentase kemiskinan dan pengangguran. Artinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat berhubungan dengan kedua aspek tersebut. Nilai indeks gini yang terus mengalami penurunan mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pemerataan pendapatan terhadap masyarakat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbedaan kondisi ketimpangan yang dihasilkan indeks williamson dimungkinkan terjadi karena aspek yang digunakan dalam indeks williamson adalah data PDRB per kapita. PDRB ataupun PDRB per kapita bisa saja menunjukkan nilai yang tinggi, karena yang dihitung adalah nilai produksi,

sementara indeks gini menggunakan data pengeluaran/kemampuan masyarakat, jadi yang dilihat adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

F. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *Shift Share* di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Struktur Ekonomi

Sektor potensial dan memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar dimasing-masing kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi pada sektor non pertanian (sektor tersier dan sekunder). Artinya telah terjadi transformasi struktur ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2010-2016. Perbandingan hasil SSA dalam interval tahun 2010-2016 jika diambil 3 sektor pada masing-masing wilayah yang memiliki nilai pertumbuhan terbesar pada komponen *proportionality shift* dan *differential shift*. Diperoleh hasil bahwa sektor sekunder dan tersier memiliki dekomposisi pertumbuhan yang lebih baik dari sektor primer karena memiliki nilai koefisien terbesar.

2. Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi kelas

Berdasarkan tipologi kelas menunjukkan bahwa.

- a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*) meliputi 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat Dan Kota Mataram.

- b. Daerah dengan maju tapi tertekan (*high income and low growt*) meliputi 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Dompu.
- c. Daerah yang berkembang cepat (*high growth and low income*) meliputi 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Tengah
- d. Daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) meliputi 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima Dan Kota Bima.

3. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Gini

Selama periode penelitian 2010-2016 terjadi penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dilihat dari penurunan nilai indek gini yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2010-2016, indeks gini Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010 sebesar 0,4 menjadi 0,3 pada tahun 2016. Artinya ada kecenderungan pemerataan pendapatan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama priode peneitian ini.

4. Ketimpangan Berdasarkan Indeks Williamson

Selama periode penelitian 2010-2016 terjadi penurunan ketimpangan PDRB per per kapita antara kabupaten/kota yang tidak cukup signifikan (relatif merata). Seperti indeks williamson pada tahun 2010 sebesar 0,29 menurun menjadi 0,18 di tahun 2012 akan tetapi kembali mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 0,25 menjai 0,26 di tahun 2016. Hal ini berarti membuktikan bahwa semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka tingkat kemungkinan ketimpangan yang akan terjadi semakin tinggi.

5. Kondisi Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penurunan kedua indeks ketimpangan dalam penelitian ini diikuti juga dengan penurunan indikator makro ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti yang terjadi pada tingkat persentase pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan, persentase pengangguran sebesar 5,29 persen pada tahun 2010, menjadi 3,86 pada tahun 2016. Selain pengangguran tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2010 sebesar 21,55 persen menjadi 16,49 persen di tahun 2016.

2. Saran

1. Perekonomian sektor pertanian harus diprioritaskan, karena sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja agar dapat menurunkan tingkat pengangguran. Adapun upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah penelitian, penyuluhan dan perbaikan infrastruktur dasar yang diperlukan dalam pembangunan pertanian dan jasa, seperti pengadaan jalan, jembatan, sistem irigasi dan sebagainya.
2. Daerah yang relatif tertinggal diharapkan mengembangkan potensi yang dimiliki, seperti pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, membangun infrastruktur untuk memudahkan mobilitas barang dan jasa, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat atau sentra ekonomi di daerah melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pembangunan ataupun kesenjangan pendapatan perlu diketahui secara mendasar, seperti aliran modal yang tidak merata, infrastruktur dan sumber daya. Sarana dan

perasarana publik perlu ditingkatkan di daerah yang relatif terbelakang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas masyarakat, karena daerah terbelakang selalu identik dengan tingkat produktifitas masyarakat yang rendah, produktifitas rendah menyebabkan masyarakat sulit untuk mengakses pendapatan yang lebih layak.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin, (1999), Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Boediono, (1985), Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik [BPS](2015), Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Barat 2015, Nusa Tenggara Barat: BPS.
- Badan Pusat Statistik [BPS](2016), Produk Domestik Regional Bruto Nusa Tenggara Barat 2016, Nusa Tenggara Barat: BPS.
- Djojohadikusumo, S. (1994), Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan peluang. Jakarta: Erlangga.
- Rustiadi, E. (2007), Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Tarigan, R. (2007), Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P & Smith, S. C. (2006), Pembangunan Ekonomi. Terjemahan H. Munadar, Edisi Kesembilan Jilid I. Jakarta: Erlangga